

RUU Cipta Kerja Harus Disikapi Kritis

YOGYA (KR) - Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, menimbulkan pro-kontra hingga saat ini. Karenanya dalam situasi ini, kalangan akademisi hendaknya menyikapi dengan kritis dan skeptik.

"Sehingga ketika RUU ini diterapkan akan memberikan arah lebih baik, meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM Indonesia yang unggul, berdaya saing dan berkarakter yang pada akhirnya akan membuat kesejahteraan masyarakat," tegas Rektor Universitas Widy Mataram (UWM) Yogyakarta Prof Dr Edy Suandi Hamid MEd. Hal itu disampaikan dalam webinar nasional bertajuk 'Evaluasi Konstruktif untuk Memperkuat RUU Omnibus Law Cipta Kerja dalam Rangka Menyejahterakan Rakyat dan Bangsa Indonesia', yang diselenggarakan CLDS FH UII dan Fakultas Hukum UWM, Rabu (2/9).

Dalam kesempatan tersebut turut serta menjadi narasumber dari beberapa perguruan tinggi, seperti Prof Jawahir Thontowi PhD (Fakultas Hukum UII), Prof Dr Ari Hermawan SH MHum (Fakultas Hukum UGM), Prof Dr Muhammad Fauzan SH MHum (Fakultas Hukum Unsoed), Prof Dr Nurhasan Ismail SH MSi (Fakultas Hukum UGM), Dr Murdoko SH MH (Fakultas Hukum UWM) dan Dr Gabriel Lele SIP MSi (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM).

"Menyikapi pembahasan RUU Cipta Kerja ini kami tidak sekadar menerima atau menolak, pro-kontra, namun diperlukan sikap dan du-

lingkungan nalar untuk melengkapi berbagai pandangan," lanjut Prof Edy.

Menurut anggota Parampara Praja Pemda DIY itu, sebagai akademisi bisa saja setuju dan tidak setuju namun dapat bersepakat dengan berbagai perbaikan dengan meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang dapat ditimbulkan. RUU ini juga tidak bisa serta merta diterapkan karena membutuhkan pembahasan yang memadai dan komprehensif. Situasi sebagai dampak Pandemi Covid-19, juga harus diperhitungkan dalam pembahasan agar tidak bersifat kontraproduktif.

Sebagai antisipasi ke-

pan lanjut Prof Edy, maka harus dipersiapkan skema untuk membantu kalangan yang menjadi korban Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Termasuk skim bantuan, subsidi, asuransi atau sejenisnya. Cakupan Omnibus Law ini sangat luas. Bahkan untuk aspek pendidikan bisa saja dikeluarkan dari RUU ini mengingat adanya values dan ideologi yang bisa risikan diperterukannya hanya untuk kepentingan penciptaan lapangan kerja, manakala dampaknya juga tidak signifikan.

"Ada banyak hal yang juga harus menjadi perhatian dan perlu dikritisi. Satu hal yang juga sudah sering muncul sejak lama adalah potensi terjadinya komodifikasi pendidikan. RUU Cipta Kerja ini telah melonggarkan prinsip nirlaba yang ditegaskan baik dalam UU



KR-Istimewa
Prof Edy Suandi Hamid

Sisdiknas maupun UU PT bisa berdampak luas dalam dunia pendidikan kita," kata mantan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi se Indonesia (APTISI) itu.

Prof Edy mengatakan, dalam RUU CK Pasal 53 ditegaskan bahwa badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal dapat berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana

secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Frasa 'dapat' tersebut sangat mudah ditafsirkan sejatinya penyelenggaraan pendidikan adalah bersifat laba, tetapi diperbolehkan juga nirlaba. Hal ini bertolak belakang dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 53 ayat 3) dan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (pasal 60 ayat 2).

Menurut Ketua Forum Rektor Indonesia Periode 2008-2009 itu, tidak jelas apa yang mendasari perubahan tersebut yang dapat berakibat pendidikan menjadi sesuatu yang mahal. Hal itu jelas akan mengurangi akses masyarakat untuk kuliah, dan semakin memperlambat upaya untuk memeratakan pendidikan pada setiap level pendapatan masyarakat

dan di seluruh wilayah tanah air. Jika ini dikaitkan dengan upaya untuk memperoleh pajak dari lembaga pendidikan, maka ini menjadi sangat naif dan terlalu mahal biayanya.

Nuansa RUU Cipta Kerja sebut Prof Edy dimaksudkan untuk menstimulus perekonomian, seharusnya jauh dari karakter yang birokratis. Tapi sebaliknya melakukan debirokratisasi, kecuali dengan pertimbangan yang sangat khusus. Namun dalam RUU CK ini dalam konteks perizinan penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal belum terlihat perubahan signifikan. Jika sebelumnya ditegaskan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kini penyelenggaraan pendidikan tersebut wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. **(Feb)-f**

PELANTIKAN PENGURUS IPKN DIY

Dorong Akuntabilitas Keuangan Daerah



KR-Juivntarto

Sri Sultan HB X berfoto bersama usai pelantikan Pengurus IPKN Wilayah DIY Periode 2020-2023.

YOGYA (KR) - Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY dengan penguatan kapasitas yang didukung Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN), memberi nilai lebih. Dalam fungsi sebagai pemeriksa keuangan tertinggi mampu mendorong akuntabilitas sangat baik dalam percepatan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

"Dengan nilai dasar independensi, lembaga yang bebas mandiri dan profesional, BPK yang didukung IKPN dengan auditor bersertifikat, mempunyai andil signifikan dalam membangun *good government* sesuai slogan BPK, *Accountability for All*," tegas Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Hal itu disampaikan saat melantik Pengurus IPKN Wilayah DIY Periode 2020-2023, Rabu (2/9) di Kantor BPK Perwakilan DIY, Jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta.

Pelantikan dilakukan Ketua Umum DPN IPKN, Prof Dr Bahrullah Akbar MBA CIPM CSFA CPA dan dihadiri Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Akhsanul Khaq MBA Ak CFE CMA CPA CSFA CA, Koordinator IPKN Wilayah Tengah Ade Iwan Ruswana SE MM Ak CFSa CA, dengan protokol

Covid-19 serta disiarkan secara daring. "Pengurus IPKN wilayah DIY menjadi perpanjangan tangan DPN IPKN dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsi organisasi IPKN di daerah. Terutama dalam pengembangan profesi anggota, sekaligus membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota, Provinsi DIY. semua itu untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara/daerah," tegas Bahrullah

Sedangkan Ketua Pengurus IPKN Wilayah DIY Dra VM Ambar Wahyuni MM CSFA CA Ak menjelaskan, sebagai organisasi profesi pemeriksa keuangan negara, IPKN yang diinisiasi BPK RI diresmikan di Jakarta 20 Februari 2020.

"Sebelum pelantikan, Rabu, (2/9) pagi juga dilaksanakan seminar IPKN dengan tema 'Sinergi antara Pengawasan Internal dan Pemeriksaan Eksternal Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara'. Seminar menghadirkan dua narasumber Ketua Program Studi Magister Akuntansi UGM, Prof Dr Abdul Halim MBA Ak CA dan Kepala Perwakilan BPK RI DIY Slamet Tulus Wahyana Ak CA MAk CFra QIA," ujarnya. **(R4)-f**

DAMPAK PANDEMI COVID-19

Pemda DIY Fokus Pemulihan Ekonomi

YOGYA (KR) - Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak cukup serius disektor ekonomi. Pasalnya hampir semua provinsi di Indonesia, termasuk DIY mencatat kinerja ekonomi negatif akibat pandemi Covid-19. Bahkan DIY salah satu dari tiga provinsi yang perekonomiannya terkontraksi cukup dalam. Ketiga provinsi itu adalah Bali, DKI Jakarta dan DIY.

Guna mengatasi hal itu, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, DIY akan fokus pada pemulihan ekonomi. Karena penunjang ekonomi terbesar di DIY ada di sektor pendidikan dan pariwisata, maka kedua sektor tersebut jadi fokus perhatian.

"Sektor pariwisata dan pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di DIY. Oleh karena itu sejumlah strategi sudah kami

siapkan agar ekonomi di DIY tumbuh positif. Termasuk melanjutkan program insentif atau relaksasi bagi perbankan. Memberi bantuan semacam bansos bagi usaha di mikro kecil serta beberapa hal lainnya," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji di Bangsal Kepatihan, Rabu (2/9).

Diungkapkan, keberadaan sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di DIY. Oleh karena itu, untuk pariwisata, pihaknya sudah berdiskusi dengan Dinas Pariwisata agar ke depan lebih mendorong wisata yang berkualitas. Jadi tidak sekedar mengejar kuantitas atau banyaknya wisatawan yang datang.

"Jadi bagaimana pariwisata bisa memberikan pendapatan secara ekonomi yang lebih lagi meski de-

ngan jumlah pengunjung yang sedikit," ujarnya.

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD DIY, Biwara Yuswantana menambahkan, pemerintah pusat menekankan pada penanganan Covid-19 agar kasus tidak semakin bertambah dan pemulihan ekonomi nasional. Untuk DIY sendiri, dari sisi kesehatan kondisinya semakin baik. Namun memang yang masih perlu perhatian ialah masalah ekonomi. Karena seperti DKI Jakarta dan Bali, sektor yang menggerakkan perekonomian DIY ada di pendidikan, pariwisata, dan jasa.

"Sektor pendidikan dan pariwisata di DIY sangat terdampak akibat Covid-19. Untuk itu, Pemda DIY berupaya agar sektor-sektor itu yang menjadi perhatian dalam upaya memulihkan perekonomian DIY," terang Biwara. **(Ria)-f**

KPM PKH Sasar 100 Warga Kota Yogya

YOGYA (KR) - Sebanyak 100 warga Kota Yogya mendapatkan bantuan kewirausahaan sosial Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Graduation dan 8 orang menerima bantuan jaminan hidup bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Yogya Agus Sudrajat, dana bantuan untuk KPM PKH Graduation berasal dari Kementerian Sosial RI. Sedangkan bantuan PPKS diambilkan dari APBD Kota Yogya. Khusus untuk KPM PKH Graduation, masing-masing keluarga menerima bantuan modal usaha sebesar Rp 500.000.

"Penerima bantuan, baik kewirausahaan maupun jaminan hidup itu merupakan penduduk Kota Yogya yang tersebar di 14 ke-

camatan," jelasnya, Rabu (2/9).

Dana bantuan dari Pemkot Yogya diberikan kepada 8 orang, yang terdiri dari 6 orang dengan jumlah bantuan Rp 300.000 per bulan selama 12 bulan dan akan diberikan setiap 4 bulan sekali. Sebanyak 2 orang penerima PPKS lainnya menerima bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan selama 6 bulan dan akan diberikan setiap 2 bulan sekali. Penyerahan bantuan secara simbolis sudah dilakukan pada Selasa (1/9) lalu.

Para penerima bantuan diimbau untuk memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Ia juga berharap bantuan tersebut bisa dijadikan stimulus modal usaha. Mengingat wabah Covid-19 yang tak kunjung usai, membuat banyak pengusaha, terutama bagi pedagang-pedagang kecil yang gulung

tarik. "Memang kondisi Covid-19 ini sangat menghantam kita semua. Bahkan tidak hanya pelaku usaha, melainkan juga pemerintah. Sehingga kita harus terus berusaha," imbuhnya.

Oleh karena itu pemberian bantuan ini diharapkan mampu membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Tri Wudhoyo, warga Kotagede yang menerima bantuan jaminan hidup. Ia yang kesehariannya bekerja sebagai tukang becak sangat bersyukur menerima bantuan ini.

"Pada masa wabah virus Korona ini penghasilan saya sebagai tukang becak sangat menurun. Dulu sebelum Covid-19 penghasilan saya bisa Rp 50.000 per hari, sekarang paling banyak Rp 20.000," akunya. **(Dhi)-f**

RENCANA PENGAMANAN AIR MINUM DISUSUN 2021, Revitalisasi Pipa PDAM Dilanjutkan

YOGYA (KR) - Perumda PDAM Tirtamarta Yogyakarta akan melanjutkan revitalisasi pipa induk pada tahun 2021 mendatang. Terutama melanjutkan pekerjaan dari Jembatan Sayidan ke timur hingga Gembira Loka Zoo.

Direktur Utama Perumda PDAM Tirtamarta Yogyakarta Majiya, revitalisasi pipa tahun ini sudah diselesaikan dari Wirobrajan hingga Jembatan Sayidan.

"Tahap kedua akan kami lanjutkan awal tahun depan. Namun sampai akhir tahun ini kami melakukan 26 titik galian di sepanjang Jalan Kusumanegara hingga Gembira Loka Zoo guna mengetahui kondisi pipa karena ada perbedaan volume," urainya di sela aktivitas rapat kerja Persatuan Perusahaan Air Mi-

num Seluruh Indonesia (Perpamsi) wilayah DIY-Jateng, Rabu (2/9).

Revitalisasi pipa tahap pertama dari Wirobrajan hingga Jembatan Sayidan sepanjang 2,5 kilometer, menyedot dana sekitar Rp 8 miliar. Hasil dari pekerjaan itu mampu meningkatkan debit air dari sebelumnya 4 meter kubik per detik menjadi 9 meter kubik per detik. Namun tingkat kebocoran yang teratasi hanya mencapai satu persen. Meski demikian, dengan meningkatnya debit air bersih, maka sosialisasi bagi pelanggan baru terus digencarkan.

Majiya mengungkapkan, selain akan melanjutkan revitalisasi pipa induk, pihaknya juga berkoordinasi dengan jajaran Pemkot untuk melakukan perubahan analisis investasi. Ter-

utama terhadap pergantian pipa pada jaringan lain yang masih berjenis asbes. "Untuk menekan kebocoran memang butuh biaya yang cukup besar karena harus mengganti jaringan pipa. Alhamdulillah sudah ada penyertaan modal dari Pemkot," katanya.

Sementara terkait rapat kerja, Ketua Pengda Perpamsi DIY-Jateng Samino, mengaku materi utama yang dibahas mengenai penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM). Tidak hanya pengamanan jaringan dari hulu hingga hilir, melainkan juga menyangkut produksi hingga distribusi ke pelanggan. Dengan begitu ada panduan yang jelas dan tegas mengenai layanan kebutuhan air minum bagi masyarakat. **(Dhi)-f**

Komisi C Minta Pemda DIY Serius Tangani Lingkungan Hidup

YOGYA (KR) - DPRD DIY bersama Pemda DIY saat ini sedang melakukan pembahasan tentang Perubahan APBD DIY 2020. Termasuk Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD DIY 2021.

Terkait hal ini DPRD DIY dalam hal ini Komisi C meminta agar Pemda tidak menganggap sepele tentang persoalan lingkungan hidup. Sektor ini wajib memperoleh perhatian dan sama pentingnya dengan yang lain. Jangan sampai persoalan lingkungan hidup dianggap tidak sangat penting dibandingkan isu infrastruktur, perekonomian, pendidikan, kesehatan dan budaya.

"Pemda dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLKH) jangan ragu jika mau mengajukan anggaran. Karena lingkungan hidup juga menyangkut masa depan bangsa," ungkap anggota Komisi C DPRD DIY Lilik Syaiful Ahmad, Rabu (2/9).

Lilik mencontohkan tentang keberadaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Jika B3 tidak dikelola dengan baik, tentu akan berimbas pada keberlangsungan masyarakat di masa mendatang. Untuk itu pihaknya sepakat adanya penelitian mengenai pengelolaan limbah B3. "Jika sebelumnya sudah ada, tentu bisa diperbanyak. Saya tidak bisa membayangkan kondisi kesehatan di DIY jika B3 tidak dikelola dengan baik," katanya.

Diakuinya, polusi dan limbah pasti akan mempengaruhi kesehatan. Untuk itu pihaknya berharap kepada dinas terkait agar lebih gencar lagi dalam mengedukasi

masyarakat mengenai arti pentingnya menjaga lingkungan. Dengan begitu akan tercipta pola pikir yang selaras dengan lingkungan hidup. **(Awh)-f**

MULIA
AUTHORIZED MONEY CHANGER
www.muliamoneychanger.co.id

PERUBAHAN JAM OPERASIONAL MASA PANDEMI COVID - 19

- GRAND INNA MALIOBORO HOTEL JL. MALIOBORO 60 YOGYAKARTA
TELP : 0274 - 547 688 DAN 563314
BUKA : 08.00 - 17.00 WIB
- PLAZA AMBARUMOH LOWER GROUND
TELP : 4331272
BUKA : 11.00 - 17.00 WIB
- JL. MARGO UTOMO NO. 53, (MANGKUBUMI) YOGYAKARTA
TELP : 0274 - 5015000
BUKA : 08.00 - 16.00 WIB

BUKA SETIAP HARI :
SENIN S/D MINGGU

TANGGAL	02/Sep/20	
CURRENCIES	BELI	JUAL
USD	14.650	14.900
EURO	17.450	17.750
AUD	10.750	11.000
GBP	19.600	20.000
CHF	16.050	16.350
SGD	10.725	11.025
JPY	138,00	143,00
MYR	3.425	3.625
SAR	3.675	4.025
YUAN	2.050	2.175

Catatan : Kurs sewaktu - waktu dapat berubah
Menerima hampir semua mata uang asing